

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, F. (2007). Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar). *Skripsi*. <https://onesearch.id/Author/Home>
- Assidiqi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(5), 1–11. <https://eprints.uny.ac.id/17162/>
- Azhari, F. R. (2018). Tingkat Kemandirian, Efektifitas, Pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran. *Tingkat Kemandirian, Efektifitas, Pada Pemerintah Kabupaten Pangandara*. <https://digilib.polban.ac.id/download.php?id=16909>
- Bastian, I. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga.
- Deddy, N. dkk. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Fera Maulina, R. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal OBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 11–22. <https://jurnal.polteq.ac.id/index.php/obis/article/download/30/12>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hery Susanto. (2007). Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *RPSEP-10*, 22. [http://repository.ut.ac.id/1430/1/Artikel/Hery Susanto.pdf](http://repository.ut.ac.id/1430/1/Artikel/Hery%20Susanto.pdf)
- Indrayani, I., & Khairunnisa, K. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value for Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe: (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.29103/jak.v6i1.1820>
- Irham Fahmi. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung:Alfabeta.
- Jatnika D. Ai. (2016). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi. 4(2), 1021–1034. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i2.4037>
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YPKN.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.
- Nurhayati. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 4(1), 55–66. <https://e-journal.upp.ac.id/index.php/Cano/article/view/394>
- Peraturan Pemerintah, N. 71 T. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*

(SAP). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Pilat dan Morasa. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015. *Accountability*. <https://doi.org/10.32400/ja.16026.6.1.2017.45-56>
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, 83–112. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52353/ama.v7i1.97>
- Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 738–747. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.4.2.2016.13153>
- Ruliaty, Ismail Badollahi, A. I. N. (2019). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 40–66. <https://doi.org/ttps://doi.org/10.26618/inv.v1i1.2012>
- Serli M.N, Venoya Nur A. W, Yuni A.F, Sulistiawati, S. A. (2022). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 6(3), 612–622. <https://doi.org/https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i3.819>
- Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47413/uu-no-5-tahun-1974>
- Vebi R, Imam Nazarudin Latif, I. R. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. <https://doi.org/10.31293/ekm.v10i3.5827>